



# Proceedings of the Aceh Development International Conference 2013

## Volume 1

26-28 March 2013  
Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia

*“Sustainable Development and Acceleration of  
Acehnese Welfare; Needs, Values, and Rights”*

Organized by:  
Academy of Islamic Studies, University of Malaya  
International Association of Acehnese Scholar  
Acehnese Student Association

**Contents** Volume 1

<b>ADIC-074</b> Pancacita: A Creative Puzzle Education Game To Introduce Aceh Potential And Culture For Elementary Students As The Way To Build Their Awareness How Rich Aceh Is <b>Iga Nugraheni Claudia Munthe and Mentari Amanda</b>	290-295
<b>ADIC-079</b> Transformasi Budaya: Satu Framework Menuju Perdamaian Positif Berkelanjutan di Aceh <b>Suadi Zainal</b>	296-304
<b>ADIC-061</b> Asimilasi Kedah-Aceh dari Perspektif Historikal <b>Haslinda haji Hasan dan Mohd Isa Othman</b>	305-312
<b>ADIC-176</b> Hubungan Aceh Dan Pulau Pinang Dalam Konteks Sejarah Alam Melayu: Suatu Sorotan <b>Mohd Roslan Mohd Nor, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Ruzman Md Noor, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Hamidah Jalani</b>	313-329
<b>ADIC-177</b> Gagasan Islamisasi Ilmu Di Malaysia Dan Indonesia: Analisa Terhadap Impaknya. <b>Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ruzman Md Noor, Nor Adina Abdul Kadir dan Norhidayah Yusoff</b>	330-340



## Aceh Development International Conference 2013

26 - 28 March 2013

Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur

Conference homepage: [www.adic2013.yolasite.com](http://www.adic2013.yolasite.com)

### TRANSFORMASI BUDAYA: SATU FRAMEWORK MENUJU PERDAMAIAAN POSITIF BERKELANJUTAN DI ACEH

Suadi Zainal<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi FISIP - Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

<sup>2</sup>Research and Education for Peace, Universiti Sains Malaysia, Penang-Malaysia

#### Abstrak

Sudah lebih tujuh tahun umur MoU Helsinki, Aceh belum dapat dikategorikan sebagai daerah damai positif, adanya kesejahteraan dan keadilan, dan tidak adanya kekerasan struktural dan kekerasan kultural bagi semua warga masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Untuk mencapai kepada keadaan seperti ini, pembangunan perdamaian pasca kesepakatan damai perlu melibatkan pelbagai aktivitas/program secara sistematis, saling keterkaitan dan saling mendukung program jangka pendek dengan program jangka panjang, serta pembangunan fisik dan non fisik. Oleh sebab itu pembangunan perdamaian mencakup aspek; ekonomi, politik, sosial, budaya dan psikologi supaya muncul rekonsiliasi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan individu dengan kelompok, yang hubungan mereka telah retak akibat daripada konflik yang berkepanjangan. Salah satu caranya adalah dengan mentransformasi budaya kekerasan kepada budaya perdamaian.

**Key Words:** Transformasi budaya, perdamaian dan pembangunan perdamaian

#### Pengantar

MoU Helsinki merupakan *entry point* dan *roadmap of political policies* bagi pembangunan Aceh yang dapat mengekalkan perdamaian. Melaluiinya Aceh telah memperoleh otonomi khusus dan luas yang ditetapkan dalam satu undang-undang baru bagi Aceh, yaitu; Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kondisi Aceh sekarang ini lebih kondusif dibandingkan dengan kondisi tujuh tahun sebelumnya. Tetapi belum boleh dikategorikan sebagai keadaan damai yang hakiki (perdamaian positif berkelanjutan; Adanya hubungan yang adil dan tidak eksploratif, baik antara manusia maupun manusia dengan ekologi). Tiadanya kekerasan langsung, kekerasan struktur, kekerasan budaya dan kekerasan ekologi [1]. Dengan kata lain keadaan tidak adanya kekerasan fisik, tidak adanya diskriminasi politik, ekonomi, dan budaya, tingginya legitimasi internal dan eksternal, mampu diri, dan cenderung mempertingkatkan transformasi konflik konstruktif [2].

MoU Helsinki dan UUPA adalah asas yang dapat mengarahkan dan menentukan transformasi relasi Pemerintah Aceh – Pemerintah Pusat Indonesia yang berimbang dalam pengelolaan Aceh bagi menjamin terwujud keadilan, dan menjawab problematika kehidupan masyarakat Aceh. Utamanya adalah masalah yang dipandang sebagai akar penyebab (*root causes*) munculnya konflik pemisah. Dengan demikian, memungkinkan keadaan Aceh pasca konflik menjadi damai positif berketerusan. Satu dampak positif dari berlakunya ketentuan tersebut adalah demokratisasi politik di Aceh, yang membolehkan individu non-partai (independen) mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan adanya partai lokal di Aceh, yang berjumlah enam partai (Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh,

Partai Rakyat Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Aman Sejahtera, dan Partai Bersatu Aceh) [3]. Melalui perkembangan politik semacam ini, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun berjaya menguasai Aceh. Mereka berjaya menguasai Lembaga eksekutif (Gubernur/Wakil Gubernur) dan Parlemen Aceh. Kini pemerintah Aceh adalah 'Pemerintahan GAM'. Kejayaan ini idealnya tidak saja berarti baik bagi mereka saja, tetapi juga bagi mayoritas masyarakat Aceh. Semua faktor yang telah menimbulkan pergolakan Aceh berkepanjangan dapat dihilangkan atau dikurangkan secara maksimal supaya konflik tidak muncul lagi.

Transformasi GAM, dari pemberontak kepada pengatur (*from rebel to ruler*) adalah transformasi politik yang konstruktif bagi transformasi konflik di Aceh. Akan tetapi ini belum dapat menjamin perdamaian di Aceh akan berkelanjutan, karena transformasi konflik tidak saja berhubungan kait dengan permasalahan politik, tetapi juga berkait erat dengan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, persoalan konflik Aceh bukan terbatas pada permasalahan GAM. Tetapi mencakup elemen-elemen masyarakat Aceh lainnya. Terutamanya adalah para aktivis-aktivis sivil yang berasosiasi dalam organisasi masyarakat sivil (OMS), di mana semasa konflik aktivitasnya telah memperkuat eksistensi GAM, seperti SIRA.

Untuk itu, pembangunan perdamaian pasca konflik sangat bergantung pada peranan mereka (GAM/PA) dalam mengelola dan mengatur Aceh secara efektif dan efesien melalui fungsi-fungsinya bagi menegakkan keadilan ekonomi, sosial, dan politik bagi seluruh masyarakat Aceh. Tanpa keadilan dalam perkara ini konflik akan muncul kembali [4]. Namun demikian, harapan tersebut tampak belum menjadi kenyataan yang dapat memuaskan kebanyakan hati masyarakat Aceh. Kemenangan PA menguasai Pemerintahan Aceh lebih terkesan kepada pergeseran kekuatan politik dan ekonomi baru saja di Aceh, yang didominasi oleh - GAM [5]. Majoritasnya adalah GAM level atas dan menengah. Sementara -GAM level bawah dan masyarakat korban konflik lainnya kurang diuntungkan. Sepertimana dijelaskan oleh Basyar [6], bahwa anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) terlihat lebih diuntungkan dalam pergaulan sehari-harinya dibandingkan dengan kelompok lain. Sehingga sebahagian masyarakat Aceh menilai bahwa kepemimpinan bekas pejuang GAM tidak lebih baik daripada kepemimpinan partai Indonesia-Aceh sebelumnya, di mana mereka lebih mengutamakan keperluan dan kepentingan kelompoknya. Sehingga menimbulkan pergolakan di Aceh.

Sudah memasuki periode kedua kepemimpinan bekas pejuang GAM di Aceh walaupun banyak usaha dan program yang telah dilakukan, namun nampaknya belum memperlihatkan pembangunan yang selaras dengan tuntutan ideal MoU dan UUPA secara maksimal. Implementasi UUPA masih belum optimal. Banyak pasal yang terkait hajat hidup orang banyak kelihatannya terabaikan [7]. Terutamanya adalah perkara keadilan bagi korban konflik dan Hak Asasi Manusia [8] yang dapat mengekalkan kesetabilian politik [9]. Di samping itu, masih terdapat korban konflik yang belum dipulihkan [10], tingkat kemiskinan [11] dan pengangguran [12] masih tinggi. Intimidasi, pembakaran, keganasan fisik, bahkan pembunuhan [13] masih menjadi fenomena kekerasan tiap momen pemilihan umum. Disamping itu bencana alam (banjir, tanah longsor) meningkat dan mewarnai wajah Aceh setiap tahunnya [14]. Realita semacam ini tentu sangat mengancam keamanan manusia; bebas dari ketakutan dan kekurangan.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Aceh perlu mengadopsi kerangka kerja yang dapat mempercepat proses pembangunan perdamaian yang menjamin muncul perdamaian positif berkelanjutan di Aceh. Untuk itu, melalui artikel ini penulis menawarkan satu kerangka kerja pembangunan perdamaian melalui transformasi budaya yang dapat mewujudkan dan mengekalkan perdamaian positif di Aceh.

**Definisi Perdamaian Positif Berkelanjutan.** Damai dan konflik tidaklah bertentangan, jika para kelompok/individu yang bertentangan menggunakan cara non kekerasan dan tidak mematikan dalam penyelesaian dan transformasi konflik [15]. Konflik tidak boleh dielakkan dalam kehidupan sosial [16] karena tidak ada satu pun sistem sosial yang sepenuhnya stabil, benar-benar bebas dari konflik [17]. Konflik perlu ditransformasikan dari destruktif kepada konstruktif. Oleh itu, perdamaian bukan hanya tiada perang atau tiadanya kekerasan [18]. Namun lebih dari itu, seperti dikatakan oleh Kant [19] perdamaian adalah pertanda berakhirnya semua bentuk permusuhan, tetapi ia belum dapat menjamin relasi damai itu berterusan, kecuali keadaan masyarakat dikuwal/diawasi dengan baik dengan undang-undang. Senada itu, Howard [20] menyatakan tiada perang adalah baik bagi permulaan damai tetapi belum cukup damai yang sebenarnya. Perdamaian adalah wujudnya dua perkara secara bersamaan, yaitu ketertiban/keteraturan dan keadilan. Konflik diselesaikan tanpa kekerasan atau intimidasi, dan melalui proses hukum atau rekonsiliasi.

Menurut Galtung [21] perdamaian ialah stabiliti/equilibrium, tiada kekerasan terorganisir, dan adanya semua kebaikan dalam kerjasama dan integrasi antara manusia. Oleh itu dia membagikan perdamaian kepada; *negative peace* (tidak adanya perang, wujudnya kekerasan struktur dan budaya) dan *positive peace* (wujudnya kerjasama, adil, bebas dari ketakutan dan kemauhan, dan nilai positif lainnya). Sejalan itu, Neethling [22] menyatakan perdamaian positif lebih sekadar tiada perang; holistik dan meliputi lebih banyak isu, termasuk prospek pembangunan sosial. Untuk itu, membentuk perdamaian positif berterusan adalah bekerja melampaui penandatangan perjanjian melalui langkah struktural dan non struktural, yang melibatkan negara dan masyarakat sivil.

Sementara menurut Grewal [23] konsep perdamaian positif merangkumi hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan ini telah dikembangkan oleh Galtung sejak tahun 80-an, mencakup kosmologi sosial, budaya dan ekologi. Oleh itu, menurut Mische & Harris [24] sekarang ini perdamaian negatif dan positif telah diperluaskan kepada perilaku kekerasan manusia terhadap alam. Sehingga perdamaian negatif juga bermakna hadirnya norma, kebijakan, struktur dan aksi untuk mencegah atau menamatkan kekerasan fisik, yang merusak kehidupan manusia dan integritas fungsi alam. Manakala perdamaian positif adalah wujud norma, kebijakan, sistem, dan aksi yang menghormati marwah manusia, memenuhi keperluan manusia, mendukung standard keadilan sosial dan alam sekitar, serta mempertahankan komunitas manusia dan alam.

**Pembangunan Perdamaian Positif Berkelanjutan.** Secara umum definisi pembangunan perdamaian dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu secara sempit dan secara luas. Menurut Paffenholz dan Sentama [25] secara sempit boleh ditakrifkan sebagai aktivitas pasca konflik, yang berhubung kait dengan pembinaan kapasitas, perdamaian, dan transformasi masyarakat. Perhatian utamanya memperbaiki atau transformasi positif hubungan manusia yang telah rusak. Sementara secara luas ialah sebagai payung besar yang merangkumi *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. Aktivitasnya mencakup; eskalasi konflik dan de-escalasi. Bahkan termasuk peringatan awal dan usaha tindak balas, pencegahan kekerasan, kerja advokasi, menjaga keamanan sivil dan tentera, campur tangan militer, bantuan kemanusiaan, perjanjian gencatan senjata, normalisasi dan konsolidasi.

Oleh sebab itu, sekarang ini pembangunan perdamaian terdiri dari seluruh tahapan perubahan konflik yang bertujuan membentuk perdamaian positif [26]. Sejalan itu, Peace Brigades International [27] perdamaian positif adalah merupakan hasil daripada aktivitas pembangunan perdamaian yang identik dengan transformasi konflik (*conflict transformation*), yang berfokus pada hubungan antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Sasarannya ialah perubahan hubungan yang damai positif berterusan.

Untuk mewujudkan keadaan ideal sebagaimana diuraikan di atas, banyak perkara yang berhubung kait dengan wujudnya konflik perlu ditransformasikan. Menurut Lederach [28] elemen-elemen yang perlu diditransformasikan bagi tercapai hubungan damai positif adalah: transformasi personal; transformasi relasional; transformasi struktural; dan transformasi kultural. Selaras itu, Miall et.al [29] juga menjelaskan perkara serupa, dengan menambahkan elemen lainnya, iaitu; transformasi konteks dan transformasi isi.

Selain itu, Mitchell [30] memaparkan elemen lainnya, iaitu; *transformasi proses*, yaitu; keikutsertaan multi level, usaha mengupayakan yang lemah, menjamin mereka yang terlibat langsung dalam konflik boleh mengontrol proses transformasi. Fokusnya tidak hanya pada isu-isu sekarang, tetapi juga pada trauma dan sakit yang lama serta pada setiap rasa sakit akibat ketidakadilan. Membentuk secara bersama pemahaman baru mengenai konflik, kemampuan membuat dan menjalankan prosedur untuk memelihara dan melanjutkan perubahan, serta pendidikan interaktif secara bersama bagi para kelompok bermusuhan mengenai sosial politik dan sistem ekonomi yang dimediasi oleh perantara yang memahami budaya dan sosial pihak yang bermusuhan.

Sementara Maiese [31] menyatakan bahawa untuk mewujudkan perdamaian tahan lama (*durable peace*), para pihak perlu menganalisis punca struktur konflik dan memprakarsai perubahan struktur sosial. Menggalakkan substansi dan prosedur keadilan melalui cara-cara struktural, biasanya melibatkan pembinaan institusi dan memperkuuhkan masyarakat sivil. Selanjutnya menurut Autesserre [32] strategi pembangunan perdamaian yang lebih berkesan semasa pelaksanaan perdamaian memerlukan dua pengubahsuaian utama untuk menangani punca kekerasan yang berterusan. Pertama, *peacebuilders* perlu mengutamakan pembangunan kembali negara, lebih daripada hanya mengadakan pemilihan umum. Tetapi, menumpukan lebih banyak usaha dan sumber daya bagi membina semula sistem birokrasi dan keadilan, juga menumbuhkan kembali otoritas negara atas kawasan yang kaya dengan sumber daya. Tujuannya menamatkan kekerasan terorganisir, memudahkan proses pendemokrasian, dan membantu menangani ekonomi perang dan penyeludupan yang menyalahi undang-undang. Kedua, *peacebuilders* perlu menumpukan perhatian dan sumber yang lebih banyak kepada akar konflik. Terutamanya hak-hak memperoleh tanah, reintegrasikan mantan kombatant, dan politik lokal, sosial, ekonomi, dan divisi etnik, yang dapat menimbulkan kekerasan dan mengakibat muncul perang kembali.

**Kerangka Kerja Perdamaian Postif Berkelanjutan Melalui Transformasi Budaya.** Berdasarkan hurai di atas dapat dipahami pembangunan perdamaian adalah penanganan akar konflik, dan usaha memenuhi keperluan dan kepentingan masa kini serta masa depan, yang selalunya berubah (dinamis). Untuk itu, transformasi relasi dan rekonsiliasi perlu dilakukan secara berterusan, baik dilakukan oleh pemrintah maupun masyarakat sivil, melalui pengaturan pola interaksi yang saling menguntungkan dan menghargai, dan tidak ada yang merasa dirugikan atau dihinakan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, banyak elemen dan aspek yang perlu diditransformasikan bagi membangun perdamaian, baik perdamaian negatif maupun perdamaian positif. Namun kebanyakan pakar sepakat dan menekankan pentingnya aspek politik, ekonomi dan sosial bagi pembangunan perdamaian. Banyak hasil kajian memaparkan perdamaian yang stabil mesti dibina atas tiga fondasi tersebut untuk dapat melayani keperluan-keperluan penduduk [33] Untuk itu, menurut penulis yang paling utama perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah transformasi semua elemen mesti membawa dampak positif kepada tiga perkara tersebut, dan semua orang dijamin boleh akses kepada tiga perkara tersebut secara adil, bermartabat, dan tanpa kekerasan bagi memiliki kehidupan yang wajar.

Mengingat konflik Aceh lebih disebabkan faktor salah urus (*structural error*) dan budaya, maka yang paling utama ditransformasikan adalah struktur dan budaya, yang dapat membawa dampak positif kepada perubahan politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini memungkinkan mereka memenuhi keperluan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sikap, perilaku dan hubungan sosial memiliki kualitas damai yang tinggi, yaitu kerjasama positif yang penuh dengan kedamaian. Karena setiap orang dan kelompok merasa memerlukan dan diperlukan oleh orang dan kelompok lainnya untuk menjadi sejahtera. Untuk itu, kualitas hubungan harmonis akan dipertahankan bagi terpenuhinya keperluannya secara berkelanjutan.

Namun demikian, melalui paper ini penulis hanya fokus pada transformasi budaya. Budaya merupakan hasil daripada konstruksi sosial yang berbentuk materil dan immateril, yang diarahkan kepada keselamatan (*survival*) pemiliknya dari pelbagai ancaman, baik fisik maupun mental. Budaya adalah banyak hal, namun seperti satu set lensa di mana melaluianya semua pihak yang terlibat konflik harus melihat. Kebudayaan juga merupakan media di mana pola-pola perilaku dan nilai-nilai tumbuh dan diwariskan pada satu generasi ke generasi berikutnya. Akar konflik yang mendalam sudah tertanam dalam cerita budaya dan mitos sehingga lebih tahan terhadap transformasi. Akhirnya budaya membentuk dan mencerminkan pembentukan identitas dan cara kita membuat dan memberikan makna [34].

Secara sosiologis, budaya adalah cara hidup, yang mencakup kepercayaan, skill, rasa, nilai, adat, perilaku, dan peraturan berperilaku. Tidak semua budaya adaptif, sebagianya kadaluarsa, dan sebagian lainnya lebih banyak menimbulkan masalah berbanding menyelesaiannya [35]. Untuk itu, ia perlu ditransformasikan kepada arah yang konstruktif bagi pembangunan dan pembinaan masyarakat. Oleh itu, budaya perdamaian ialah bertindak dengan menggalakkan saling peduli dan kesejahteraan. Tindakan semacam ini perlu disokong oleh pengaturan-pengaturan institusi khas, yang merefleksikan norma sosial, nilai, dan pengetahuan. Oleh itu, budaya perdamaian boleh bermakna transformasi dalam yang luas dalam individu dan Negara [36].

Menurut Fukushima [37] budaya dapat memainkan empat peranan dalam pembinaan perdamaian, yakni:

- 1) Katalis pembangunan perdamaian atau penyanga untuk mensokong perdamaian
- 2) Alat untuk merelatifasi (*relativize*) konflik bersenjata
- 3) Sarana membangun perdamaian dalam hati dan pikiran masyarakat tempatan, menerusi:
  - a. Membangun toleransi, saling memahami, kepercayaan, percaya diri, dan mencapai rekonsiliasi;
  - b. Menggalakkan sublimasi identiti yang telah berubah akibat perang;
  - c. Mengobati dan menghilangkan traumatic.

sosial. Dimana ketiganya saling berhubung kait dan dapat memberi pengaruh kepada pemenuhan keperluan serta kepentingan masyarakat. Sehingga memberi dampak kepada terjadinya proses interaksi masyarakat (antara individu, individu dengan kumpulan, kumpulan dengan kumpulan, dan rakyat dengan pemerintah) berlandaskan penilaian terhadap kontribusi-kontribusi yang membawanya kepada pencapaian keperluan dan kepentingan.

### Kesimpulan

Berlandaskan konsep perdamaian positif berkelanjutan di atas, maka dapat dipahami bahwa transformasi budaya kekerasan kepada budaya damai pun tidak terbatas pada bentuk perilaku kekerasan, tetapi melampaui itu, mencakup nilai dan simbol yang menyebabkan muncul kekerasan, seperti individualistik, konsumtif, pragmatis, dan lain-lainnya yang menyebabkan manusia tetap miskin, mudah dieksploitasi, dan cepat terprovokasi. Akibatnya membawa masyarakat tersebut kepada berperilaku kekerasan. Selain itu, mengingat budaya merujuk kepada internal, keadaan kolektivitas yang subjektif dalam satu sistem sosial. Budaya terus berkembang, sebagai filter aktif yang menghasilkan perspektif mengenai situasi dan persepsi mengenai masa, dan mengawali interaksi sosial melalui norma dan nilai-nilai yang dibangun secara bersama [40]. Oleh yang demikian, budaya politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Aceh juga perlu ditransformasikan mengikuti tuntutan keperluan dan kepentingan, supaya boleh merespon secara positif terhadap peluang-peluang yang diberikan oleh struktur sosial. Sehingga keperluan-keperluannya tercapai, dan konflik tidak menjadi kenyataan yang berulang dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu mengidentifikasi budaya konstruktif, kemudian disosialisasikan dan diinstitusionalisasikan. Selanjutnya segala bentuk budaya destruktif perlu didekonstruksi. Hal ini dilakukan secara demokratis, integratif, komprehensif dan inklusif. Dengan demikian pemenuhan keperluan dapat berlaku maksimal dan adil.

### Referensi

- [1] Castro, L. Navaro & Galace, J. Nario, *Peace Education: A Pathway to A Cultural Peace*, Center for Peace Education, Philippines. (2008), 14.
- [2] Reyhler, Luc & Paffenolz, Diana, *Building Peace: A Field Guide*, Lynne Rinner Publisher, United State of America Reyhler & Paffenolz (2001), 13.
- [3] Jafar, M., *Perkembangan dan Prospek Partai Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang (2009).
- [4] Kalla, Yusuf, *Tidak Ingin Ada MOU Lagi di Aceh*, <http://www.inilah.com/>, (2010).
- [5] Nurhasim dan Bhakti, *Merajut Perdamaian Berkelanjutan di Aceh* (dalam Beranda Perdamaian), Pustaka Pelajar, Jakarta. (2008), 380.
- [6] Basyar, Hamdan, Nurhasim, Asvi, WA., Zuhro, S., Ichwanuddin, W., 2008, *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Integrasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta. (2008), 168.
- [7] Rizki Adhzar, UUPA, *Aceh dan Potensi yang Tergadai dalam Implementasi UUPA Setengah Hati dan Setengah Mati*, Modus Aceh, Edisi 24-30 Oktober (2011)
- [8] ICTJ (International Center for Transitional Justice), *Pentingnya Pertanggungjawaban: 5 tahun Berjalannya Memorandum Helsinki*, <http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-MoU> (2010). Poengky Indarti, *Enam Tahun MoU Helsinki, Penegakan HAM di Aceh Masih Dipertanyakan*, <http://hminews.com/news/>, (2011)
- [9] Maiese, Michelle, *Human Rights Protection*, <http://www.beyondintractability.org/bi-essay/>, (2004)
- [10] Koalisi NGO HAM, Pemerintah Aceh, termasuk DPR Aceh, tidak punya kemauan politik menyelesaikan berbagai persoalan korban konflik di Aceh. <http://aceh.tribunnews.com/2011/08/12/>.
- [11] Syech Suhaimi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin di gampong-gampong di provinsi Aceh hingga September 2011, 730.890. Meningkat 0,14 persen dibandingkan posisi Maret, 718.780 orang. <http://www.acehtraffic.com/2012/01/>

- [12] Syech Suhaimi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penganggur di Aceh per Februari 2011 mencapai 171 ribu orang. Meningkat cukup tinggi dibandingkan angka pengangguran per Agustus 2010 yang totalnya 162 ribu orang. <http://harian-aceh.com/2011/05/06/>
- [13] Mulyana W Kusumah, *Keganasan di Aceh Bukti Operasi Senjata Api Ilegal Gagal*, <http://zonadama.wordpress.com/2012/01/02/>
- [14] Lihat Bencana Alam Aceh Setiap tahun Meningkat, <http://www.greenradio.fm/news/latest/>. Sejak 2007 hingga 2012 banjir terjadi 975 kali di Aceh, lihat DAS di Aceh Rentan Terhadap Banjir Kiriman, <http://www.suaraleuserantara.com/2013/02/02/>.
- [15] Webel, C., 2007, *Introduction Toward a philosophy and metapsychology of peace* in Handbook of Peace and Conflict Studies, Routledge, New York. (2007), 9.
- [16] Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada (2000).
- [17] Pruitt, Dean dan Rubin, Jeffrey Z, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2004), 39
- [18] Op. Cit., Webel, (2007), 7.
- [19] Kant, Immanuel, *Perpetual Peace, A Philosophical Essay* (1795), Translated By Campbell Smith, New York : The Macmillan Company. (1903), 107-118
- [20] Howard, Michael, *Peace Studies: The Hard Questions*, Oxford, London. (1987), 2-4.
- [21] Galtung, *Positive Peace Politic for Japan; Some Proposals*, Center of International Studies, Princeton University, New Jersey (1986), 12.
- [22] Neethling, Theo, *Pursuing sustainable peace through post-conflict peacebuilding: The case of Sierra Leone*, African Security Review Volume 16, Issue 3, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/> (2007), 92.
- [23] Grewal, Baljit Singh, *Galtung: Negative Peace and Positive Peace*, [http://upeaceap.org/hando\\_upfiles/FCPC\\_RM\\_06\\_1.pdf](http://upeaceap.org/hando_upfiles/FCPC_RM_06_1.pdf) (2003).
- [24] Mische, Patricia & Harris, Ian, *Environmental Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding*, <http://www.tc.edu/centers/epe/PDF%20articles/>, (2008), 2.
- [25] Paffenholz dan Sentama, *Peacebuilding in Post Genocide Rwanda* (2009) 3.
- [26] UKaid, *Building Peaceful States and Societies*, Department for International Development. London, UK. (2010), 14.
- [27] Peace Brigades International, *Participatory Peace Education Manual*, <http://www.propatria.or.id> (2008), 9.
- [28] Ledrach, John Paul, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C.: USIP Press, (1999) 82-83.
- [29] Miall, Hugh, Oliver Romsbotham, Tom Woodhouse , *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, (2000)
- [30] Mitchell, C. "Beyond Resolution: What does Conflict Transformation actually Transform?", in: Peace and Conflict Studies, Vol.9, No.1, May, (2002).1-22.
- [31] Michelle, *Peacebuilding*, <http://www.beyondintractability.org/bi-essay/>, (2003),3
- [32] Autesserre, Séverine, *Peacetime Violence: Post-Conflict Violence and Peacebuilding Strategies*, Program on States and Security, <http://www.statesandsecurity.org/>(2009)
- [33] Maina, Grace, *Making Deals for Peace: The Peace and Justice Dilemma*, Policy & Practice Brief, Knowledge for durable peace, ACCORD.duk, (2011), 7.
- [34] Michelle LeBaron, *Transforming cultural conflict in an Age of Complexity*, Berghof Handbook for Conflict Transformation, <http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2578/pdf> (2001)
- [35] Federico, Ronald, C., *Sociology*, Philipines: Addison-Wesley Publishing Company. (1975), 83.
- [36] Rivera, Joseph de, *Handbook on Building Cultures of Peace*, Springer Science Business Media, LLC, New York, USA, (2009), 1.
- [37] Fukushima, Kiki, *Peace and Culture: Fostering Peace through Cultural Contributions* (in Conflict and Culture Fostering Peace through Cultural Initiatives), Joint Research Institute for International Peace and Culture Aoyama Gakuin University The Japan Foundation, New York, (2011), 7.
- [38] Op. Cit., Rivera, (2009), 2.
- [39] Douglas P. Fry, Bruce D. Bonta, and Karolina Baszkiewicz, *Learning from Extant Cultures of Peace in Handbook on Building Cultures of Peace*, <http://www.springer.com/978-0-387-09574-5>, (2009), 11-26.

- [40] Gelleman, Mneesha Ilanya, *Powerful Cultures: Indigenous and Western Conflict Resolution Processes in Cambodian Peacebuilding*, [http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/PCD/%20Issue%2011\\_Article](http://www.peacestudiesjournal.org.uk/dl/PCD/%20Issue%2011_Article), (2007).